

Peran Modal Sosial Dalam Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat

Oleh : Dahnil Johar *)

ABSTRACT

This research is aimed to find out the factors causing the existence of informal financial institution/ community's enterprises group (Lembaga Keuangan Informal/ Kelompok Swadaya Masyarakat (LKI/KSM)) and how it plays its role for small farm enterprises (Usaha Tani Kecil/UTK) in the research area, as well as the basic elements and effective financial institution model for UTK. Objectives of the research is responded with multi-cases research approach including formal financial institution (Lembaga Keuangan Formal/LKF) (PT BPR-LPN Sungai Rumbai, PT BPR Rangkiang Aur, and Koperasi Pegawai Republik Indonesia - Guru-Guru Payakumbuh Utara /KPRI-GPU), semi-formal (LKMA Panampung Prima. KSPP Lundang), informal financial institution (LPN Pulau Mainan, BMT Panampuang), in Dharmasraya district, Payakumbuh City, and Agam District. Data is analyzed using qualitative and quantitative descriptive method, in which its analysis framework is the reconstruction of financial institution including the analysis of deconstruction and synthesis (Martius, 2004). Based on the analysis result, the research conclusion is that the suitability of financial institution characteristic with UTK nature and dynamic, effectiveness of credit service, and the ability of internal capital mobilization in the form of collective capital and ziswah (zakat, infaq, shodaqoh, waqaf, and hibah) are the factors causing the effectiveness of LKI/KSM role in serving UTK in the research area. The effectiveness of LKI/KSM role is greatly determined by social capital role, religious values and custom values underlying every activity done by the institution, mainly the institution's establishment, credit service, and internal capital mobilization. Afterwards, from the analysis result, it can be concluded also that some basic elements of financial institution which are effective for UTK in the rural area include the orientation of institution's establishment in favor of UTK interest in the rural area, suitability of institution's characteristic and UTK dynamics, effectiveness of credit service and the ability of internal capital mobilization. Based on those basic elements, effective model of financial institution for UTK in the rural area is ideally based on the partisanship principle on UTK interest in the form of the suitability of financial institution characteristic with the nature and dynamics of UTK, as well as the effectiveness of credit service and independency principle and institution's sustainability through internal capital mobilization.

Keywords: *Informal financial institution, social capital, religious values and custom values.*

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha tani dan berskala kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta industri rumah tangga. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yakni terbatasnya ketersediaan modal, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan (Hamid, 1986).

Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang dan lembaga perbankan yang sulit diakses oleh petani kecil, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumber dana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini baik Lembaga Keuangan Formal (LKF), Lembaga Keuangan Semi Formal (LKSF), maupun Lembaga Keuangan Informal (LKI/KSM), yang sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Belum optimalnya pemanfaatan LKF dan LKSF bentukan dan binaan pemerintah bagi usaha kecil menengah di pedesaan memberikan indikasi bahwa pemerintah hanya terfokus pada bagaimana memasukkan modal eksternal ke pedesaan tanpa mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat dan potensi sosial budaya di pedesaan (Kartasmita, 1992; Abdurrahman dan Soekartawi, 1977; Siamwala, 1980), misalnya lembaga keuangan yang ada, karakteristik usaha tani, potensi modal sosial,

serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan perkembangan lembaga keuangan dan permodalan usaha tani kecil. Sementara eksistensi LKI /KSM di pedesaan mampu berperan melayani kebutuhan usaha kecil menengah, walaupun masih dalam lingkup terbatas kelompok tertentu.

Persyaratan formal LKF dan LKSF yang dikenal dengan 5-C (*Character, Capital, Capacity, Condition dan Collateral*) merupakan kendala utama bagi usaha tani dalam mengakses dana dari perbankan. Menurut (Mubyarto 2004), dalam kondisi seperti ini diperlukan sebuah lembaga yang bertindak sebagai Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER) yang berfungsi menjembatani antara Usaha Tani Kecil untuk mengatasi keterbatasannya mengakses lembaga keuangan formal (industri perbankan) dengan lembaga keuangan baik lembaga keuangan formal maupun informal untuk mengatasi kendala menjangkau nasabah karena kekurangan informasi tentang kinerja usaha tani. Selama ini baru ada Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) berdasarkan aliran kapitalis atau aliran yang melindungi para pemilik modal yang seharusnya tidak diperlukan. Konsultan Keuangan Mitra Ekonomi Rakyat (KKMER) yang didasari modal sosial (kepercayaan, norma, dan jaringan) akan dapat membantu kesulitan baik yang dialami oleh usaha tani maupun kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro dalam mengembangkan usahanya. Putnam (1993) dalam Ancok (2003), telah pula menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi sangat berkorelasi positif dengan kehadiran modal sosial.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan lebih mudah. Dengan saling percaya, toleransi, dan kerjasama mereka dapat membangun

jaringan baik di dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lainnya.

BAHAN DAN METODE

Konsep dan Peran Lembaga Keuangan

Lembaga masih diartikan secara beragam. Sebagian para ahli membedakan pengertian lembaga dan organisasi, sebagian lagi tanpa membedakannya. Hayami dan Ruttan (1984) mengartikan lembaga sebagai aturan yang dianut oleh masyarakat atau organisasi yang dijadikan pegangan oleh masyarakat. Kemudian Stephen Robbins dalam Kuncoro (1994) mendefinisikan lembaga sebagai organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batas yang relatif dapat ditentukan, dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan bersama.

Lebih jelas Cooley dan Davis (dalam Sarjono, 1989) menyatakan bahwa lembaga merupakan kaedah-kaedah yang kompleks yang ditetapkan oleh masyarakat, untuk secara teratur memenuhi kebutuhan pokoknya. Lembaga dipandang sebagai perangkat kebiasaan, tata kelakuan dan hukum yang berkaitan dengan berbagai fungsi yang merupakan bagian dari struktur sosial yang berlaku.

Untuk memahami pengertian lembaga keuangan secara jelas perlu dikemukakan beberapa definisi oleh beberapa para ahli. Chandler (1991) mendefinisikan lembaga keuangan sebagai suatu lembaga yang melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan penggunaan uang atau kredit, membantu penyaluran tabungan dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kemudian Seibel (1996) secara lebih jelas mendefinisikan lembaga

keuangan sebagai suatu badan yang menghimpun dana, memberikan kredit kepada masyarakat atau penyertaan modal, maupun melakukan lebih dari satu kegiatan tersebut diatas sekaligus.

Dalam pasar uang lazim dikenal dua istilah yaitu lembaga keuangan formal dan informal (Chandler, 1981), walaupun diantara kedua lembaga tersebut terdapat istilah lembaga keuangan semi formal (Seibel 1996; Kropp, 1998). Penggunaan istilah formal dan informal dalam pasar kredit pedesaan banyak digunakan para peneliti dalam berbagai penelitian. Namun masih sedikit literature yang mengemukakan tentang pengertian istilah formal dan informal.

Dalam kaitan ini Chandler (1981) secara sederhana menekankan pentingnya aspek hukum atau adanya izin resmi pemerintah dalam penggunaan istilah formal dan informal untuk lembaga keuangan pedesaan. Menurutnya Lembaga Keuangan Formal (LKF) adalah apabila lembaga keuangan tersebut berbadan hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Sebaliknya dikatakan Lembaga Keuangan Informal (LKI) apabila lembaga keuangan tersebut belum/tidak berbadan hukum atau tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.

Berbeda dengan Chandler (1981), Kropp (1989) membedakan LKF dengan LKI dengan menekankan pada aspek apakah ada pengawasan dari pemerintah (bank sentral) terhadap lembaga keuangan atau tidak. Menurutnya lembaga keuangan dapat digolongkan kedalam LKF apabila lembaga tersebut berada dibawah pengawasan pemerintah atau bank sentral. Artinya teransaksi kredit yang dijalankan oleh lembaga tersebut tunduk pada undang-undang atau kebijakan kredit pemerintah. Sebaliknya apabila tidak berada dalam pengawasan

pemerintah atau transaksi kredit tidak tunduk pada undang-undang atau kebijakan keuangan/kredit pemerintah maka lembaga ini digolongkan kedalam LKI.

Kemudian Seibel (1996) menggabungkan kedua kriteria di atas untuk membedakan LKF dan LKI. Menurutnya suatu lembaga keuangan dikatakan formal apabila mendapat izin dari pemerintah pusat atau menteri keuangan RI dan berada di bawah pengawasan lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang misalnya bank sentral atau departemen keuangan. Sedangkan lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang tidak memperoleh izin dari pemerintah atau instansi tertentu dan tidak berada dalam pengawasan bank sentral atau departemen keuangan maupun instansi pemerintah.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), lembaga keuangan mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their family*” (Kompas, 15 Maret 2005). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan, 2007) memiliki ciri utama, yaitu; (1) menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, (2) melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan (3) menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di perdesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter perdesaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin. Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

Pengertian dan Peran Modal Sosial

Menurut James Coleman (1990) modal sosial merupakan inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi membentuk jaringan sosial yang menciptakan berbagai ragam kualitas sosial berupa saling percaya, terbuka, kesatuan norma, dan menetapkan berbagai jenis sanksi bagi anggotanya. Putnam (1995) mengartikan modal sosial sebagai “*features of social organization such as networks, norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit*”. Modal sosial menjadi perekat bagi setiap individu, dalam bentuk norma, kepercayaan dan jaringan kerja,

sehingga terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial juga dipahami sebagai pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki bersama oleh komunitas, serta pola hubungan yang memungkinkan sekelompok individu melakukan satu kegiatan yang produktif. Hal ini sejalan pula dengan apa yang dikemukakan Bank Dunia (1999) modal sosial lebih diartikan kepada dimensi institusional, hubungan yang tercipta, norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial pun tidak diartikan hanya sejumlah institusi dan kelompok sosial yang mendukungnya, tapi juga perekat (*sosial glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok sebagai suatu kesatuan.

Menurut Lesser (2000), modal sosial ini sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media *power sharing* atau pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas. Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggungjawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggungjawab akan kemajuan bersama.

Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust, believe and vertragen* artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan

sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. James S. Coleman (1998) menegaskan bahwa, modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Simpulan sederhana dan umum yang dapat diajukan tentang elemen utama modal sosial mencakup *norms, reciprocity, trust*, dan *network*. Keempat elemen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan kerjasama maupun kelompok secara kolektif. Secara nyata dalam keseharian, apabila dicermati secara mendalam, semua perilaku aktivitas sosial-ekonomi warga masyarakat lokal melekat dalam jaringan hubungan-hubungan sosialnya. Modal sosial dan kepercayaan (*trust*) dapat membuat dan memungkinkan transaksi-transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak yang terkait untuk bisa (1) mengakses lebih banyak informasi, (2) memungkinkan mereka untuk saling mengkoordinasikan kegiatan untuk kepentingan bersama, dan (3) dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan *opportunistic behavior* melalui transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Secara inheren modal sosial mengandung *social sense*.

Hampir semua bentuk modal sosial terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang.

Mendasarkan pada beberapa pengertian dan elemen penyusun modal sosial seperti tersebut dalam Tabel1., nampaknya dapat dilakukan suatu generalisasi dan simplifikasi tentang elemen-elemen utama dari modal sosial. Simpulan sederhana dan umum yang dapat diajukan tentang elemen utama modal sosial mencakup *trust norms*, dan *network*.

Ketiga elemen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kerjasama untuk mencapai hasil yang diinginkan yang mampu mengakomodasi kepentingan individu yang melakukan kerjasama maupun kelompok secara kolektif. Secara nyata dalam keseharian, apabila dicermati secara mendalam, semua perilaku aktivitas sosial-ekonomi warga masyarakat lokal melekat dalam jaringan hubungan-hubungan sosialnya.

Tabel 1 . Beberapa Pengertian dan Elemen Dasar dari Modal sosial

Sumber	Pengertian dan Elemen Dasar Modal Sosial
Coleman (1988)	Modal sosial consists of some aspects of sosial structures, and they facilitate certain actions of actors--whether persons or corporate actors--within the structure
Putnam et.al (1993)	Features of sosial organization, such as trust, norms (or reciprocity), and networks (of civil engagement), that can improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions
Narayan (1997)	The rules, the norms, obligations, reciprocity and trust embedded in sosial relations, sosial structure and society's institutional arrangements which enable members to achieve their individual and community objectives
Uphoff (1999)	Modal sosial can be considered as an accumulation of various types of intangible sosial, psychological, cultural, institutional, and related assets that influence cooperative behavior
Dhesi (2000)	Shared knowledge, understandings, values, norms, and sosial networks to ensure the intended results Modal sosial mencakup institutions, relationships, attitudes dan values yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi-interaksi antar orang dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.
World Bank (1998)	modal sosial tidaklah sesederhana hanya sebagai penjumlahan dari institusi-institusi yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi juga merupakan perekat dan penguat yang menyatukan mereka secara bersama-sama. Modal sosial meliputi shared values dan rules bagi perilaku sosial yang terekspresikan dalam hubungan-hubungan antar personal, trust dan common sense tentang tanggung jawab terhadap masyarakat, semua hal tersebut menjadikan masyarakat lebih dari sekedar kumpulan individu-individu.

Sumber: Coleman (1988); Putnam et.al (1993) ; Narayan (1997); Uphoff (1999); Dhesi (2000)

Modal sosial dan kepercayaan (*trust*) dapat membuat dan memungkinkan transaksi ekonomi menjadi lebih efisien dengan memberikan kemungkinan bagi pihak-pihak yang terkait untuk bisa (1) mengakses lebih banyak informasi, (2) memungkinkan mereka untuk saling mengkoordinasikan kegiatan untuk kepentingan bersama, dan (3) dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan *opportunistic behavior* melalui transaksi-transaksi yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Secara inheren modal sosial mengandung sosial sense. Hampir semua bentuk modal sosial terbentuk dan tumbuh melalui gabungan atau kombinasi tindakan dari beberapa orang.

Peran Modal Sosial Dalam Lembaga Keuangan Mikro

Ismawan (2002) menjelaskan hubungan antara modal sosial dan lembaga keuangan mikro. Dia menyatakan bahwa modal sosial seperti masyarakat lokal, pemerintah daerah dapat memperkuat intermediasi keuangan yang ada, dan dilain pihak dapat pula menghancurkan modal sosial seperti pemberi pinjaman uang, subsidi. Dia juga menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro membantu membangun modal sosial untuk meningkatkan penyaluran informasi, partisipasi demokratis, pengambilan keputusan kolektif dan pembangunan berkelanjutan.

Ronchi (2004) menyatakan bahwa modal sosial dan keuangan mikro yang memperkuat satu sama lainnya. Setiap pembangunan berkelanjutan membutuhkan kombinasi modal alami, fisik dan modal manusia serta modal sosial. Program keuangan mikro menggunakan modal sosial dalam masyarakat dan link tersebut untuk modal fisik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi modal sosial, semakin rendah biaya dan saling menguntungkan yang dapat

meningkatkan kinerja pembayaran. Ronchi (2004) mempelajari peran modal sosial dalam pelaksanaan program-program keuangan mikro di Ekuador dan menyimpulkan bahwa modal sosial telah membantu dalam meningkatkan partisipasi politik yang lebih luas, intervensi kuat dalam proses pengambilan keputusan dan lebih menguatkan posisi tawar bagi perempuan miskin. Oksan (2008) mengungkapkan bagaimana program keuangan mikro dapat memberikan kontribusi untuk kesadaran politik dan aktivisme sosial klien melalui proses pengembangan *self efficacy* dan modal sosial.

Dimensi dan Tipologi Modal Sosial

Dimensi modal sosial menggambarkan segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, serta didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi (Dasgupta dan Serageldin, 1999). Dimensi modal sosial inheren dalam struktur relasi sosial dan jaringan sosial di dalam suatu masyarakat yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma, serta sanksi-sanksi sosial bagi para anggota masyarakat tersebut (Coleman, 1999).

Namun demikian Fukuyama (1995, 2000) dengan tegas menyatakan, belum tentu norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dipedomani sebagai acuan bersikap, bertindak, dan bertingkah-laku itu otomatis menjadi modal sosial. Akan tetapi hanyalah norma-norma dan nilai-nilai bersama yang dibangkitkan oleh kepercayaan (*trust*). Dimana kepercayaan ini adalah merupakan harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma-

norma yang dianut bersama oleh para anggotanya. Norma-norma tersebut bisa berisi pernyataan-pernyataan yang berkisar pada nilai-nilai luhur (kebajikan) dan keadilan.

Demensi lain yang juga sangat menarik perhatian adalah yang berkaitan dengan tipologi modal sosial, yaitu bagaimana perbedaan pola-pola interaksi berikut konsekuensinya antara modal sosial yang berbentuk *bonding/exclusive* atau *bridging/inclusive*. Keduanya memiliki implikasi yang berbeda pada hasil-hasil yang dapat dicapai dan pengaruh-pengaruh yang dapat muncul dalam proses kehidupan dan pembangunan masyarakat.

1) Modal Sosial Terikat (*Bonding Social Capital*)

Modal sosial terikat adalah cenderung bersifat eksklusif (Hasbullah, 2006). Apa yang menjadi karakteristik dasar yang melekat pada tipologi ini, sekaligus sebagai ciri khasnya, dalam konteks ide, relasi dan perhatian, adalah lebih berorientasi ke dalam (*inward looking*) dibandingkan dengan berorientasi keluar (*outward looking*). Ragam masyarakat yang menjadi anggota kelompok ini pada umumnya homogenius (cenderung homogen).

Di dalam bahasa lain *bonding social capital* ini dikenal pula sebagai ciri *sacred society*. Menurut Putman (1993), pada masyarakat *sacred society* dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarchical, dan tertutup. Di dalam pola interaksi sosial sehari-hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan level hierarki tertentu dan feodal.

Hasbullah (2006) menyatakan, pada masyarakat yang *bonded* atau *inward looking* atau *sacred*, meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat, akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan

masyarakat tersebut untuk menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh sekedar dalam batas kelompok dalam keadaan tertentu, setruktur hierarki feodal, kohesifitas yang bersifat *bonding*.

2) Modal Sosial yang Menjembatani (*Bridging Social Capital*)

Mengikuti Hasbullah (2006), bentuk modal sosial yang menjembatani ini ini biasa juga disebut bentuk modern dari suatu pengelompokan, group, asosiasi, atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada prinsip-prinsip universal tentang: (1) persamaan, (2) kebebasan, serta (3) nilai-nilai kemajemukan dan humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Prinsip persamaan, bahwasanya setiap anggota dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok masyarakat hanya menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok.

Selanjutnya Woolcock (2001) membedakan tiga tipe kapital sosial, yaitu (1) *bonding social capital*, (2) *bridging social capital*, dan (3) *linking social capital*. Ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung keadaannya³. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia juga dapat digunakan dan dijadikan pendukung sekaligus penghambat dalam ikatan sosial sehingga tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan daerah ini ditentukan secara *purposive*, dengan alasan

³) Dahnil Johar, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi
Universitas Andalas Padang

daerah ini merupakan representasi dari situasi dan kondisi kelembagaan keuangan pedesaan di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa di Sumatera Barat banyak terdapat lembaga keuangan yang relatif beragam (Imelia, 1997); Nuwirman, 1998; Zakri, 2001; Munir 1991) dengan dukungan modal sosial dalam masyarakat

yang masih kuat (Lain dan Karimi, 1987); Nuwirman, 1998; Zakri, 2001).

Untuk keperluan analisis diambil sampel daerah penelitian yakni daerah kabupaten Dharmasraya, Agam dan Kota Payakumbuh seperti terlihat pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Pemilihan Responden Pada Masing-Masing Lembaga Keuangan

Tabel 3.1. Karakteristik Responden				
Lembaga Keuangan	Sampel			
	Pengurus	Anggota	Informan	Jumlah
	(Org)	(Org)	(Org)	
PT. BPR Sungai Rumbai	3	15	5	23
PT BPR Rangkiang Aur	3	16	4	23
KPRI-GPU	3	14	6	23
LKMA Panampuang	3	44	6	53
KSPK Lundang	3	45	5	53
LPN Pulau Mainan	3	43	7	53
BMT Agam Madani	3	41	9	53
	21	218	42	281

Dalam penelitian ini pada dasarnya digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, didukung dengan analisa kuantitatif baik menggunakan tabel frekuensi maupun tabulasi silang. Metode ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola-pola, kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga akan diperoleh tema dan kesimpulan (Moleong, 1993). Cukup banyak studi mengenai eksistensi dan peran kelembagaan keuangan di pedesaan yang dianalisis dengan mengandalkan analisa kualitatif (Nuwirma, 1998; Zakri, 2001; Djoni, 1996; Imelia, 1997; Minir, 1991).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data dianalisis dengan dua tahapan yaitu tahap analisis kondisi obyektif/dekonstruksi dan analisis sintesis (Martius, 2004).

1. Analisis Kondisi Obyektif.

Pada tahap ini dilakukan analisis kondisi obyektif beberapa LKM / KSM yang sudah eksis di daerah penelitian yang dianggap berhasil dalam melayani UTK . Konstruksi suatu lembaga pada dasarnya dibangun oleh dua elemen penting, yaitu elemen struktur peran(*hardware*) dan elemen sistem nilai (*software*) (Mery, 1993; Syafaat, 1997; Badrun, 1997). Dalam konteks penelitian ini elemen struktur peran berupa

aspek sifat dan dinamika usaha tani yang menjadi obyek pelayanan permodalan dan peran LKM/KSM dalam memenuhi kebutuhan modal, sedangkan elemen sistem nilai berupa bentuk dan peran modal sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat serta kebijakannya pemerintah. Dari analisis ini diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi eksistensi dan peran LKM/KSM serta prinsip-prinsip masing-masing lembaga berdasarkan keempat aspek tersebut yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

2. Analisis Sifat dan Dinamika Usaha Tani.

Analisis terhadap sifat dan dinamika usaha tani meliputi variabel luas lahan, status kepemilikan lahan, jenis usaha, tujuan penggunaan kredit, jumlah kredit, agunan, sumber modal, prosedur dan persyaratan kredit dan sistem pengembalian kredit. Pada tahap awal dilakukan klarifikasi data untuk mencapai konsistensi dan ketepatan interpretasi data, sehingga diperoleh deskripsi sifat dan dinamika usaha tani peminjam kredit pada masing-masing lembaga keuangan. Selanjutnya dilakukan abstraksi-abstraksi teoritis (pemahaman mendalam) terhadap informasi lapangan, sehingga diperoleh pernyataan simpulan yang bersifat mendasar dan universal mengenai sejauh mana Usaha Tani Kecil (UTK) dengan sifat dan dinamika yang demikian memperoleh pelayanan kredit. Kemudian dilakukan analisa komparasi antara

satu model dengan model yang lainnya, sehingga diketahui perbedaan sifat dan dinamika usaha tani yang dilayani. Dari analisis ini diperoleh kesimpulan mengenai sifat dan dinamika usaha tani yang akan dipertimbangkan dalam menentukan modal sosial yang seperti apa yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan di pedesaan.

3. Analisis Efektifitas Peran LK/KSM

Dalam Tabel 3. terlihat efektifitas lembaga keuangan /KSM dalam pembiayaan usaha tani kecil, dianalisis secara kualitatif yaitu terhadap falsafah pendirian lembaga, aksesibilitas, keadilan distribusi, dan kemanfaatan kredit. Fokus falsafah pendirian lembaga meliputi latar belakang dan orientasi pendirian. Fokus aksesibilitas, meliputi berbagai indikator yaitu prosedur dan persyaratan, agunan, lokasi lembaga, waktu pengajuan/pencairan kredit, dan pengembalian. Fokus keadilan distribusi meliputi nasabah penerima kredit dan jumlah/alokasi kredit. Fokus kemanfaatan kredit meliputi peningkatan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan modal. Sedangkan fokus peran pengurus dalam mobilisasi modal yaitu sejauh mana peran pengurus dalam mobilisasi modal internal/eksternal dan keberlanjutan lembaga. Pada tahap ini proses klarifikasi, abstraksi, dan komparasi data dari lapangan (lembaga keuangan kasus) tetap dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat mendasar dan universal.

Tabel 3. Efektivitas Kesesuaian Karakteristik Model LKI/KSM, LKF dan LKSF dengan UTK Model LKI/KSM, LKF dan LKSF dengan UTK

Sifat & Dinamika UTK	Karakteristik Lembaga Keuangan Kasus		
	LKF	LKSF	LKI/KSM
Lahan terbatas, usaha bersifat musiman, dan modal terbatas	Target utama usaha tani skala menengah dan besar dan memiliki modal	Target utama usaha tani skala kecil dan modal terbatas	Target utama usaha tani skala kecil dan modal terbatas
Tidak memiliki agunan	Syarat agunan mutlak	Tidak menerapkan syarat agunan	Tidak menerapkan syarat agunan
Hanya mampu mengakses pinjaman yang tidak bunga	Pinjaman bunga	Pinjaman umumnya tidak bunga/bunga rendah	Pinjaman tidak bunga/bunga rendah
Hanya mampu mengakses kredit yang mudah diperoleh	Prosedur dan persyaratan administrasi sulit diakses, lokasi sulit dijangkau, pencairan kredit relatif lama, pengembalian pinjaman sulit dan tidak fleksibel	Prosedur dan persyaratan administrasi mudah diakses, lokasi mudah dijangkau, kredit cepat diperoleh, pengembalian pinjaman mudah dan fleksibel	Prosedur dan persyaratan administrasi mudah diakses, lokasi mudah dijangkau, kredit cepat diperoleh, pengembalian pinjaman mudah dan fleksibel

Sumber : Data Primer diolah

4. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam penelitian ini merupakan analisis kebijakan yang bersifat *retrospektif* (Dunn, 2003) yaitu dengan mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran kredit sektor pertanian pangan secara umum maupun regulasi, pendanaan/bantuan modal (penyaluran kredit), dan program pembinaan yang pernah diterima lembaga keuangan kasus. Kemudian melalui pendekatan empiris (Dunn, 2003), dilakukan

evaluasi peran dan dampaknya terhadap eksistensi lembaga keuangan di pedesaan dan penguatan permodalan usaha tani selama ini. Dari analisis ini diketahui kebijakan mana yang belum efektif, apa penyebabnya dan kenapa demikian, serta kemungkinan koreksi yang diperlukan. Pada akhir analisis, melalui pendekatan normative (Dunn, 2003), akan diperoleh kebijakan apa saja yang masih relevan dan diperlukan guna mendukung dan menjamin *sustainability* model kelembagaan tersebut.

5. Analisis Model Lembaga Keuangan

Hasil analisis dari synthesis ketiga model lembaga keuangan (LKF, LKSF dan LKI) diperoleh elemen-elemen dasar dan

merumuskan model lembaga keuangan yang ideal untuk usaha tani. Hal ini terlihat pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Sintesis Model Lembaga Keuangan Ideal Untuk Usaha Tani Kecil di Pedesaan

Aspek – aspek Elemen Dasar Konstruksi	Sintesis
	Model LK Hasil Rekonstruksi
1. Sifat dan dinamika UTK 1) Sifat UTK 2) Dinamika UTK	Sifat dan dinamika usaha tani menjadi pertimbangan umum mengatasi persoalan kredit UTK. Kesesuaian karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK menjadi faktor penting penyebab berperannya lembaga keuangan melayani UTK secara efektif.
2. Efektifitas Peran LK 1) Falsafah Pendirian 2) Efektifitas pelayanan - Aksesibilitas - Manfaat kredit - Keadilan Distribusi	- Idealnya LK dibangun dengan berpihak pada kepentingan masyarakat/UTK. - Idealnya berorientasi kepentingan UTK, mudah diakses, dan mampu memenuhi kebutuhan kredit dan meningkatkan pendapatan.
3. Peran pengurus dalam mobilisasi modal :	- Idealnya mengandalkan mobilisasi modal internal didukung modal eksternal : pengurus melibatkan anggota - LK idealnya merupakan lembaga lokal (<i>indigenous institution</i>), Pelayanan kredit mudah diakses dan dilandasi nilai 2. sosial, tdk hanya berorientasi utk kebutuhan modal tetapi juga peningkatan pendapatan UTK (<i>Social and economic perspective</i>) - LK tidak hanya berperan mengatasi masalah kelangkaan modal / menyediakan fasilitas kredit tetapi juga membangun / mengembangkan LK yang mandiri dan berkelanjutan dengan mobilisasi modal internal (<i>availability and sustainability oriented</i>)
4. Peran modal sosial nilai2 bersama, partisipasi, kepercayaan, kontribusi financial,(pemanfaatan masjid, majlis taklim, pengelolaan ziswah)	Modal social yang terintegrasi dengan nilai – nilai agama dan adat merupakan kunci keberhasilan lembaga dan idealnya menjadi landasan kegiatan lembaga dan terbentuknya kekuatan internal (<i>mobilisasi modal internal</i>)
5. Peran pemerintah a. Regulasi b. Bantuan modal : c. Pembinaan :	- Idealnya regulasi tidak menghambat LK tidak diformalkan) - Bantuan modal (eksternal) idealnya tidak menyebabkan intervensi dan ketergantungan lembaga. - Idealnya sangat berperan terhadap peningkatan keterampilan pengurus dan anggota. Kebijakan pemerintah idealnya tidak menyebabkan ketergantungan lembaga pada pemerintah. Lembaga keuangan idealnya bertumpu pada kemampuan mobilisasi modal internal (<i>internal mobilization</i>) melalui tindakan kolektif' (<i>collective action</i>), sehingga mandiri dan berkelanjutan. Modal eksternal hanya sebagai pendukung dan diberikan pada Lk yang telah eksis dan berperan dg modal internal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka diperoleh simpulan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

Terdapat empat faktor yang menyebabkan bertahannya lembaga keuangan informal dalam melayani UTK di daerah pedesaan

Kesesuaian karakteristik.

Kesesuaian karakteristik lembaga dengan sifat dan dinamika UTK menyebabkan LKI/KSM mudah diakses oleh UTK. Karakteristik lembaga dicirikan oleh UTK sebagai target utama pelayanan kredit, prosedur dan persyaratan administrasi relatif mudah, tidak menerapkan agunan, sistem pengembalian relatif ringan dan fleksibel, dan lokasi mudah dijangkau. Sedangkan sifat dan dinamika UTK dicirikan oleh luas lahan terbatas, masih terdapat petani penggarap, dan usaha bersifat musiman. Sedangkan dinamika UTK meliputi ketergantungan pada pinjaman / kredit, tidak memiliki agunan, dan hanya mampu mengakses kredit yang tingkat bunganya rendah serta mudah dan cepat diperoleh.

Efektivitas pelayanan kredit.

Efektivitas pelayanan kredit pada LKI/KSM menyebabkan kredit dirasakan manfaatnya oleh UTK baik kebutuhan kredit maupun peningkatan pendapatan. Hal ini di samping ditentukan oleh prosedur dan persyaratan administrasi yang mudah, sistem pengembalian yang ringan dan fleksibel, dan tidak adanya syarat agunan. juga oleh. peran pengurus dalam mengawasi penggunaan kredit dan memotivasi anggota. Semua aktivitas dijabarkan dengan dasar kepercayaan, memanfaatkan partisipasi anggota dan membentuk norma yang sesuai dengan kondisi anggota/masyarakat yang dilayani.

Kemampuan Mobilisasi Modal Internal.

Keberhasilan dalam mobilisasi modal internal menyebabkan LKI/KSM khususnya LPN Pulau Mainan memiliki sumber modal utama (setoran modal awal dan tabungan), sehingga mampu memberdayakan UTK baik dalam pemenuhan kebutuhan modal maupun peningkatan pendapatan tanpa bergantung pada mobilisasi modal eksternal terutama dari pemerintah.

Kebijakan Pemerintah pada Lembaga Keuangan

Dari aspek kebijakan pemerintah, pada analisis di muka menunjukkan bahwa KSM tidak memiliki ketergantungan pada pemerintah, sehingga mampu eksis dan berperan untuk UTK. Sebaliknya eksistensi dan peran LKF cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Demikian pula dengan LKSF, karena lembaga ini dibangun (prakarsa) dan dibina oleh pemerintah daerah sehingga modal awal dan manajemen operasional lembaga merupakan kewajiban pemerintah daerah.

Dari aspek peran lembaga keuangan yang efektif untuk UTK ditentukan oleh metode / cara yang harus dilakukan oleh pengurus antara lain:

Azas Kepercayaan.

Menimbulkan rasa saling percaya antara pengelola dan anggota dengan jalan membuat sistem kerja yang saling menguntungkan antara pengelola dan anggota. Rasa saling menguntungkan akan muncul apabila hasil dari kegiatan yang dilakukan dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak atau tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Keadaan ini akan menimbulkan rasa saling percaya, simpati, saling berpartisipasi dan rasa memiliki terhadap lembaga.

Terbentuknya Sistem Jaringan

Usaha pengurus dan anggota melakukan kegiatan dalam sebuah jaringan kerja sama yang didasari oleh rasa kekerabatan, kebertemanan, dan kebertetanggan serta kesamaan aktivitas keseharian (etnis, pekerjaan dan profesi) akan memudahkan komunikasi dan mempermudah memecahkan persoalan kelompok / lembaga, akhirnya disamping menyebabkan biaya

opersional akan jadi rendah, juga akan mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Penetapan aturan/norma lembaga

Pembentukan norma sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal yang ditetapkan atas kesepakatan bersama, akan membuat lembaga lebih mudah menerapkan aturan dan akan meningkatkan ketaatan anggota terhadap norma/aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhesi, Autar S, 2000, *Social Capital and Community Development*, Community Development
- Djoni, Asril, 1996 *Pengembangan Lumbung Pitih Nagari: Suatu Perspektif Pengembangan Lembaga*, Thesis yang tidak dipublikasikan, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Gunawan dkk, 1989 *Perubahan Kelembagaan Pertanian Pasca Adopsi Padi Unggul* Prosiding Patanas Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Hamid E.S..1986, Rekaman dari Seminar. Dalam Kredit Pedesaan di Indonesia. Mubyarto dan Edy Suandi Hamid (Eds) .BPFE Yogyakarta
- Hasbullah J, 2006 *Social Capital Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: R-United Press Jakarta.
- Imelda, 1997 *Peran Lembaga Keuangan Formal dan Informal Dalam Aspek Permodalan Usaha Kecil di Kecamatan Lintau Buo I Sumatera Barat*. Thesis Yang Tidak di Publikasikan, Program Pascasarjana Unand Padang.
- Kartasasmita, G. 1996, *Pembangunan Untu Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Korpp, Erhard. Et al, 1989 *Linking Self-Help Groups and Banks in Developing Countries*, APRACA GTZ, Eschborn.
- Lains, Alfian dan Syafruddin Karimi,1987 *Ekonomi Pembangunan-Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Ketiga UPP-AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Lesser, E., 2000, *Knowledge and Social Capital: Foundation and Application*, Boston : Butterworth-Heinemann,
- Martius, Endri, 2004 *Rekonstruksi Pengelolaan Sumber Daya Air: Endogenisasi Teknologi*, Disertasi PPS-UGM, Yogyakarta.
- Moleong,. L. 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubiyarto, 2004. *Pemulihan Kembali Fungsi Perbankan Sebagai Intermediasi di Bidang Keuangan*, Institut Bankir Indonsia, Jakarta,
- Munir, S, 1991, *Peran Lembaga Keuangan Pedesaan di Sumatera Barat* (Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman, Tesis, PPs KPK IPB-Unand.

- Narayan, 1997, *Voice of the Poor: Poverty and Social Capital in Tanzania*, World Bank,
- Nuwirman, 1998, *Peran Organisasi Lokal Dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidup Ekonomi Masyarakat Miskin Pedesaan*. Thesis Pada Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.25.
- Putnam, et.al., 1993, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton
- Seibel, H.D. 1996 *Financial System Development and Microfinance* GTZ, Robdorf, Jerman.
- Siamwlla, Ammar, 1980, *Rural Credit and Rural Proverty*, Rural Proverty in Asia: Priority Issues in and Policy Option.
- Soekartawi, 1986, *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*, UI Press, Jakarta.
- Uphoff, N, 1999, *Understanding Social Capital: Leraning from the Analysis and Experience of*
- World Bank, 1998, *The Initiative on Defining, Monitoring and Measuring Social Capital: Yogyakarta Province*, Working Paper Series No. 03-H-01, Department of Agriculture and Yogyakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud,
- Zakri, Ahmad, 2001 *Efektifitas Ukan saha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung* . Thesis yang tidak dipublikasi, PPs Unand, Padang.